

**PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL
DI PROVINSI JAMBI**

T E S I S



Oleh :

MASRIDA ZASRIATI,SE
BP : 09212 06 023

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

RINGKASAN

Penelitian yang berjudul ” Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional di Provinsi Jambi bertujuan untuk menganalisa Bagaimana pengelompokan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat dilakukan berdasarkan Klassen Tipology, Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan Ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2000-2010, Adakah pengaruh Dana Perimbangan terhadap ketimpangan Ekonomi regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, serta Kebijakan dan Program pembangunan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi.

Yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan PDRB Atas dasar Harga Konstan, Pendapatan Perkapita rata-rata sehingga terlihat tingkat ketimpangan antar Kabupaten/ Kota serta Dana Perimbangan sehingga dapat diketahui pengaruh DAK, DAU dan DBH terhadap ketimpangan Ekonomi Regional di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sejak tahun 2000 sampai tahun 2010 secara rata-rata sebesar 0,40 adalah ketimpangan **relatif sedang**. Dari klasifikasi tipology maka ada beberapa daerah yang masih dikategorikan daerah sedang berkembang (Kuadran III) adalah Sarolangun dan Bungo, sedangkan Kabupaten Kerinci Merangin, Batang Hari, Muaro Jambi, dan Tebo merupakan Kabupaten/Kota berada pada daerah relatif terbelakang (Kuadran IV).

Selanjutnya hasil analisis regresi yang ditemukan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum berpengaruh **negatif atau menurunkan** secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh **positif atau mendorong** secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Dari hasil penelitian tersebut dapat di susun Implikasi terhadap perencanaan Pembangunan Daerah berupa Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Daerah yang diperlukan untuk meminimalisir ketimpangan pembangunan di Provinsi jambi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki latar belakang antar daerah yang berbeda-beda, perbedaan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya, serta sebaran sumber daya alam. Tumbuhnya pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah yang menyebabkan timbulnya daerah – daerah atau bisa disebut kantong pertumbuhan, sehingga ketimpangan output antar daerah menjadi lebih tinggi.

Pemerintah berusaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengkonsentrasikan kegiatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan tertentu yang biasanya di daerah perkotaan. Pusat pertumbuhan ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya sebagai daerah pemasok kebutuhan pusat pertumbuhan. Namun, tanpa disadari kebijakan tersebut menimbulkan persoalan baru yaitu ketimpangan pembangunan antar-daerah dan sekaligus juga ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Akselerasi pembangunan akan lebih cepat dicapai jika terdapat keseimbangan pembangunan antar-daerah. Percepatan ini dapat dijelaskan misalnya jika terjadi penambahan dana pembangunan, akan lebih membawa

dampak peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif merata dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini akan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih besar dan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bila ini tercapai maka beban daerah-daerah tertentu dapat dikurangi karena berkurangnya penduduk yang melakukan perpindahan dari daerah pedesaan ke perkotaan.

Selaras dengan hal tersebut dan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, maka pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan ke setiap daerah. Walaupun otonomi daerah sudah dimulai sejak Tahun 2001 namun untuk provinsi Jambi Realisasi Dana Perimbangan kepada setiap Kabupaten/Kota baru pada tahun 2003. Alokasi dana perimbangan antar daerah melalui DAK, DAU dan DBH yang tidak merata di setiap daerah disebabkan perbedaan kemampuan keuangan daerah dan perbedaan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah tentunya hal ini akan berpengaruh pada ketimpangan pembangunan setiap daerah, untuk lebih rinci tentang perkembangan dana perimbangan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan
Dana Bagi Hasil Di Provinsi Jambi Tahun 2003-2010

TAHUN	DAK (juta)	Pertumbuh an (%)	DAU (juta)	Pertumbuh an (%)	DBH (juta)	Pertum buh an(%)
2003	90,950.33	-	1,383,236.45	-	259,929.99	-
2004	92,385.40	1.58	1,440,042.34	4.11	370,954.87	42.71
2005	108,020.00	16.92	1,525,250.00	5.92	471,004.00	26.97
2006	182,227.66	68.70	2,319,624.99	52.08	1,777,958.24	277.48
2007	359,435.18	97.25	2,718,524.79	17.20	1,068,243.44	-39.92
2008	402,314.08	11.93	2,908,098.90	6.97	1,037,067.78	-2.92
2009	409,665.00	1.83	2,957,571.06	1.70	1,160,754.54	11.93
2010	567,910.49	38.63	2,779,500.30	-6.02	1,522,261.78	31.14
Rata-rata		33.83		11.71		49.63

Sumber : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi

Dari tabel diatas terlihat bahwa dana perimbangan yang di alokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota di provinsi Jambi tahun 2003 – 2010 terlihat berfluktuasi dimana pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2006 sebesar 68.70%, 2007 sebesar 97.25 % dan 2010 sebesar 38.63 % tetapi secara rata-rata pertumbuhan DAK sebesar 33,83 % pertahun, sedangkan pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 52,08%, 17,20% tetapi secara rata-rata pertumbuhan DAU sebesar 11,71% , begitu juga dengan Dana Bagi Hasil pada tahun 2006 terjadi pertumbuhan sebesar 277% atau secara rata-rata pertumbuhan DBH sebesar 49,63% pertahun

hal ini disebabkan realisasi Dana Perimbangan dari pemerintah pusat kepada sebagian daerah yang memiliki sumber daya energi dan mineral, minyak, batubara sehingga daerah tersebut mendapatkan Dana Bagi Hasil yang besar sedangkan sebagian daerah yang tidak memiliki potensi tersebut mendapatkan alokasi yang masih sedikit sehingga hal ini menjadi persoalan bagi daerah-daerah lainnya.

Dalam upaya merealisasi pembangunan nasional maka pembangunan daerah harus ditingkatkan dari seluruh nilai kegiatan ekonomi baik berupa produksi barang maupun jasa suatu daerah dalam satu satuan waktu (tahun) dapat dijadikan indikator. Dalam hal demikian, perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijadikan acuan. Dengan pendekatan ini menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan balas jasa atau pendapatan kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Perhitungan total PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk tiap-tiap daerah memang menggambarkan kekayaan daerah dari sudut produksi dan kegiatan ekonomi. Tetapi apakah kekayaan daerah juga menjadi kekayaan penduduknya, itu cerita lain lagi. Nyatanya, tidak semua kegiatan ekonomi dimiliki oleh masyarakat disuatu daerah. Bisa saja suatu daerah hanya menjadi tempat terjadinya kegiatan ekonomi saja, sedang kepemilikannya datang dari luar daerah tersebut. Atau sumber daya alam berada di daerah tersebut, tapi segala produk dan kegiatan ekonominya diatur oleh perusahaan global atau oleh

pemerintah pusat. Sehingga hasilnya pun lebih banyak yang ditarik keluar daerah tersebut atau ke pemerintah pusat di Jakarta. Bisa dikatakan manfaat dan alokasi investasi dari keuntungan dinikmati oleh pemilik modal, sedangkan penarikan sebagian besar keuntungan bagi hasil dan pajak dinikmati oleh pemerintah pusat, dengan demikian Pembangunan daerah diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999: Blakely, 1989). Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor (Kuncoro, 2004).

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari Hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Klasifikasi ekonomi kabupaten/kota di Propinsi Jambi tahun 2000 – 2010 berdasarkan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan pendapatan perkapita dapat di bagi menjadi empat kuadran atau kelompok yaitu kabupaten/kota cepat maju dan cepat tumbuh Kuadran I adalah Kota Jambi, Kabupaten Tanjung jabung Timur dan Kota Sungai Penuh. Kabupaten yang maju tapi tertekan atau Kuadran II yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten yang berkembang cepat atau Kuadran III adalah Kabupaten Sarolangun dan Bungo. Sedangkan Kabupaten Kerinci, Merangin, Batang Hari, Muaro Jambi dan Tebo merupakan Kabupaten/Kota dalam Provinsi jambi yang berada pada daerah relatif terbelakang (Kuadran IV) .
2. Ketimpangan pembangunan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi jambi selama periode 2000 samapai 2010 mengalami peningkatan (*divergence*) secara rata-rata sebesar 0,40 artinya ketimpangan yang **relatif sedang** sesuai dengan kriteria yaitu berkisar antara $0 < Vw < 1$ apabila Vw mendekati 1 (satu) berarti sangat timpang dan bila Vw mendekati 0 (nol) berarti sangat merata. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sjafrizal (2008:108)

3. Hasil analisis regresi yang ditemukan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum berpengaruh **negatif atau menurunkan** secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh **positif atau mendorong** secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

4. Untuk mengatasi masalah ketimpangan di Provinsi Jambi, maka perlu disusun kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Kebijakan untuk pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan adalah :

- a. Memanfaatkan Dana Alokasi Khusus secara optimal
- b. Meningkatkan efisiensi Dana Alokasi Umum
- c. Mendorong Peningkatan Dana Bagi Hasil bagi daerah yang belum mengelola secara optimal potensi dan Keunggulan Sumber daya Alam yang dimilikinya

2. Strategi pembangunan daerah

1. Strategi yang berkaitan dengan pemanfaatan dana alokasi khusus secara optimal

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi
- b. Peningkatan infrastruktur pelayanan public
- c. Peningkatan kualitas pendidikan

- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- e. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas.

2. Strategi yang berkaitan dengan peningkatan Efisiensi Dana Alokasi Umum

- a. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD, Dana Perimbangan, maupun Pendapatan lain yang sah
- b. Pemanfaatan pinjaman daerah, pengembangan perusahaan daerah
- c. Pengembangan sektor pertanian ke arah agribisnis
- d. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat
- e. Memacu pertumbuhan produksi unggulan daerah
- f. Penataan kelembagaan dan administrasi pemerintah

3.2. Strategi yang berkaitan dengan peningkatan Dana Bagi Hasil

- a. Peningkatan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam
- b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup
- c. Pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian bencana

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin.** 2004. *Ekonomi Pembangunan* : edisi kedua, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik** Provinsi Jambi.2000, *Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa terbitan*, BPS Jambi. Jambi
-2010. *Propinsi Jambi dalam Angka tahun 2100*
- Gujarati.** 2003. *Dasar- Dasar Economitrika* : edisi ketiga. Erlangga. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- 2006. *Dasar- Dasar Economitrika* : edisi ketiga. Erlangga. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Giyanto.** 2001. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Daerah si Sumatera Barat.* Padang. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Hasriati, Afni.** 2005. *Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Salah Satu Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat.* STIS Jakarta
- Jhingan, M.L,** 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Edisi 12.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kuncoro, M dan Aswandi, H.** 2002. *“Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993 – 1999”.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 17, No. 1. 27 – 45. UGM, Jogjakarta.
- Kuncoro, M dan Sutarno.** 2003. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Jambi, 1993-2000.* Jurnal Ekonomi Pembangunan. 97-110
- Sjafrizal.** 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat.* Prisma LP3ES, Jakarta.
- . 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi.* Baduouse. Padang
- Sukirno, S.** 1983. *Pengantar Teori Makro Ekonomi.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.